

B A B III

PELAKSANAAN BADAN KREDIT DESA (BKD) DI DESA JANTI KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI

A. Sekilas Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

1. Letak Geografis Desa Janti

Desa Janti adalah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Sedangkan jarak antara Kecamatan Papar dengan Kecamatan lainnya kurang lebih 5 (lima) Kilometer persegi. Jarak Desa Janti dengan Kabupaten kurang lebih 14 (empat belas) Kilometer persegi.

Daerah-daerah yang membatasi dengan Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Manggungan Kecamatan Pagu.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Minggiran Kecamatan Papar.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Papar.

Luas areal tanah atau luas wilayah Desa Janti Kecamatan Papar kurang lebih 250 Ha. Desa Janti Kecamatan Papar terbagi menjadi 4 (empat) kedukuhan yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Dusun (Kasun) diantaranya ialah sebagai berikut :

- a. Dukuh Tegalrejo.
- b. Dukuh Krusuan.
- c. Dukuh Kandangan.
- d. Dukuh Pesantren. (Sumber data : Kantor Desa).

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 1994/1995 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri berjumlah sekitar 3000 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel I

Jumlah penduduk dilihat dari jenis kelamin

NO.	Jenis Kelamin	Jiwa
1.	Laki-laki	1.527 Jiwa

2. ! Perempuan ! 1.473 Jiwa

Jumlah ! 3.000 Jiwa

(Sumber Data : Kantor Desa Janti).

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya telah mempunyai bermacam-macam usaha atau mata pencaharian yang sesuai dengan profesinya masing-masing yang pada garis besarnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel II

Keadaan Sosial Ekonomi

NO.	Status Penduduk	Jumlah
1.	ABRI	6 Jiwa
2.	Pegawai Negri Sipil	24 Jiwa
3.	Pegawai Swasta	25 Jiwa
4.	Pensiunan ABRI/Sipil	11 Jiwa
5.	Petani	140 Jiwa
6.	Pertukangan	65 Jiwa

Berdirinya Badan Kredit Desa (BKD) tidak bisa dipisahkan dari berdirinya AVB (yang sekarang menjadi BRI) pada akhir abad ke 19 (1890 an). Kehadiran BKD erat kaitannya dengan keadaan ekonomi pedesaan di Jawa yang memprihatinkan yang disebabkan oleh gagal panen secara luas akibat kemarau panjang, banjir dan serangan hama yang ganas. Berdasarkan pengalaman yang pahit ini asisten residen Banyumas di Purwokerto DE WOLFF VAN WESTERRODE berusaha membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat guna mengatasi keadaan dengan cara membuat Lumbung-Lumbung Desa untuk menanggulangi keadaan akibat musim paceklik yang sering terjadi terutama di Jawa. Kelompok-kelompok Swadaya masyarakat ini berdiri dengan landasan (prinsip) Koperasi Reifeizen di Jerman yang dalam prakteknya di Jawa dilaksanakan dengan prinsip Rembug Desa. Masyarakat Jawa telah terbiasa melakukan gotong-royong dalam melakukan berbagai kegiatan sebelumnya selalu diawali dengan Rembug Desa dan setelah kesepakatan tercapai masyarakat selalu melaksanakannya dengan konsekwen.

Pada tahun 1896 Pati Purwokerto Raden Bei Aria Wiriaatmadja telah mendirikan Bank yang disebut Bank Priyayi dengan tujuan untuk memberi bantuan kepada para pegawai dan pamong praja yang banyak terlibat oleh lin-

tah darat. Untuk menanggulangi musim-musim paceklik yang selalu menghantui keadaan ekonomi di pedesaan, maka oleh kelompok Swadaya masyarakat yang berdasarkan Rembug Desa pada tahun 1897 wilayah karesidenan Banyumas Purwo - kerto didirikan 250 buah Lumbung Desa.

Perkembangan Badan Kredit Desa (BKD) selanjutnya hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 masa yaitu :

a. Masa Pertumbuhan (1897-1912)

Dalam masa ini, Badan Kredit Desa (BKD) sedang mencari bentuk Badan Perkreditan yang sesuai dengan keadaan daerah, adat istiadat dan perkembangan zaman pada waktu itu.

b. Masa Konsolidasi (1912-1934)

Dalam masa ini, kegiatan Badan Kredit Desa (BKD) diarahkan pada usaha-usaha melengkapi tata pengawasan, tata administrasi serta hukumnya.

c. Masa Usaha Koordinasi (1934-1942)

Pada masa ini, koordinasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan dibawah satu komando telah dimulai dan sebagai koordinatornya adalah Algemeene Volkscrediet Bank (AVB) sekarang BRI, sesuai SK Direksi AVB NO. 143 tanggal 13 No-

Akibat dari pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan, praktis di beberapa tempat Badan Kredit Desa (BKD) lumpuh, bahkan sebagian besar tidak bekerja.

Untuk keperluan pemulihan kembali Bank Desa, Lumbung Desa dan Koperasi Kredit, pada tahun 1952 pemerintah telah memberikan bantuan permodalan. (Dasar Hukum dan Organisasi BKD, 1992 : 1).

Badan Kredit Desa (BKD) adalah perusahaan milik desa yang beroperasi di wilayah kerja satu desa dan di-
urus sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari
kekayaan lain milik desa yang bersangkutan. Mengenai
dasar hukum yang diperlakukan dalam pelaksanaan Badan
Kredit Desa (BKD) ini adalah sebagai berikut :

tang Bank Perkreditan Rakyat.

7. SK. Menkeu. NO. 1064/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang pendirian dan usaha BPR.
8. Surat petunjuk B.I NO. 22/67/UPPS/PBPR tanggal 18 Maret 1989 perihal pengawasan dan pembinaan Badan Kredit Desa (BKD).
9. Surat petunjuk B.I. NO. 22/191/UPPS/PBPR tanggal 4 September 1989 tentang pengawas -
- wasan terhadap Badan Kredit Desa (BKD).
10. Surat petunjuk B.I. NO. 22/67/UPPS/PBPR tanggal 7 Juni 1989 perihal pengawasan ter-
- hadap Badan Kredit Desa (BKD).
11. Surat Direksi Bank Indonesia NO. 23/861/Dir /UPBD/Rahasia tanggal 20 Maret 1991 perihal pengawasan BKD yang intinya adalah sebagai berikut :
 - a. Terhitung sejak 1 April 1991, tentang mantri BKD tidak lagi bertugas sebagai pengawas dan pembina yang seharusnya di-
- lakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Direksi B.I. NO 10/51/Kep/Dir tanggal 18 Juli 1977.

c. Pengawasan BKD oleh BRI (Matri BKD) terbatas melakukan tugas-tugas pengawasan selaku Badan Prngawas BKD sebagaimana diatur dalam Stb.357/1929 Rijksblad NO. 9/1937 dan 3/H tahun 1938.

12. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS NO. 4657/K/11/90 perihal pengaktifan kembali BKD yang telah ada izin Menteri Keuangan.
13. Surat Menteri Dalam Negeri NO. 412.21/1502 /BANGDES tanggal 14 Nopember 1991 perihal pembinaan, pengaktifan kembali dan upaya pembentukan BKD baru.
14. Pidato Pengantar RAPBN 92/93 Presiden Suharto dihadapan Sidang Paripurna DPR tanggal 6 Januari 1992 tentang pengaktifan kembali 1300 BKD dan pembukaan 500-600 BKD baru.

Sejalan dengan diperlakukannya Undang-Undang Perbankan NO. 7/1992, BKD diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebagai bank yang beroperasi hanya di wilayah desa saja yang disebut dengan BKD, maka BKD yang didirikan di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri mempunyai maksud tertentu. Maksud didirikan BKD adalah : Memberikan pelayanan kebutuhan kredit kepada penduduk desa Janti yang mempunyai usaha kecil-kecilan baik sebagai pedagang maupun sebagai petani ataupun mempunyai penghasilan lain, dengan maksud agar penduduk Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dapat mengembangkan perusahaannya dengan baik untuk keperluan produksi ataupun konsumsi.

terjerat oleh praktek lembaga keuangan informal seperti: Rentenir, pengijon, bank titil atau plecit dan yang sejenisnya yang bersifat ilegal dan informal, yang pada umumnya merugikan masyarakat.

Adapun tujuannya didirikannya Badan Kredit Desa di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Mendidik masyarakat Janti untuk membiasakan dan semangat menabung sehingga terbentuk pemupukan modal dari masyarakat desa tersebut.
- b. Mengurangi dan mengatasi praktek-praktek ijon, pelepas uang/rentenir, gadai gelap dan kegiatan-kegiatan lain yang serupa yang ada di Desa Janti ini.
- c. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat Desa Janti secara terarah dan penyaluran modal yang efektif.
- d. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Janti dalam rangka usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Janti yang berpenghasilan rendah.

untuk masyarakat Desa Janti melalui Rembug Desa/musyawarah desa. Dari hasil keputusan musyawarah itu diajukan dan disyahkan oleh Bupati/Walikota madya. tingkat II.

Untuk mendirikan Badan Kredit Desa (BKD), agar dapat berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Potensi ekonomi di desa tersebut mendukung.
 - b. Pembayaran pajak di desa yang bersangkutan itu baik.
 - c. Kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya cukup tinggi.
 - d. Pengurus/Komisi BKD berakhlak baik dan tidak pernah terlibat penyalahgunaan keuangan.
 - e. Masyarakat desa tersebut menghendaki didirikan BKD melalui musyawarah desa, yang memuat Risa-lah Keputusan :
1. Jumlah penduduk desa yang hadir dan mempunyai hak suara.
 2. Apa yang disetujui Bank Desa atau Lumbung Desa.
 3. Jumlah penduduk yang setuju.

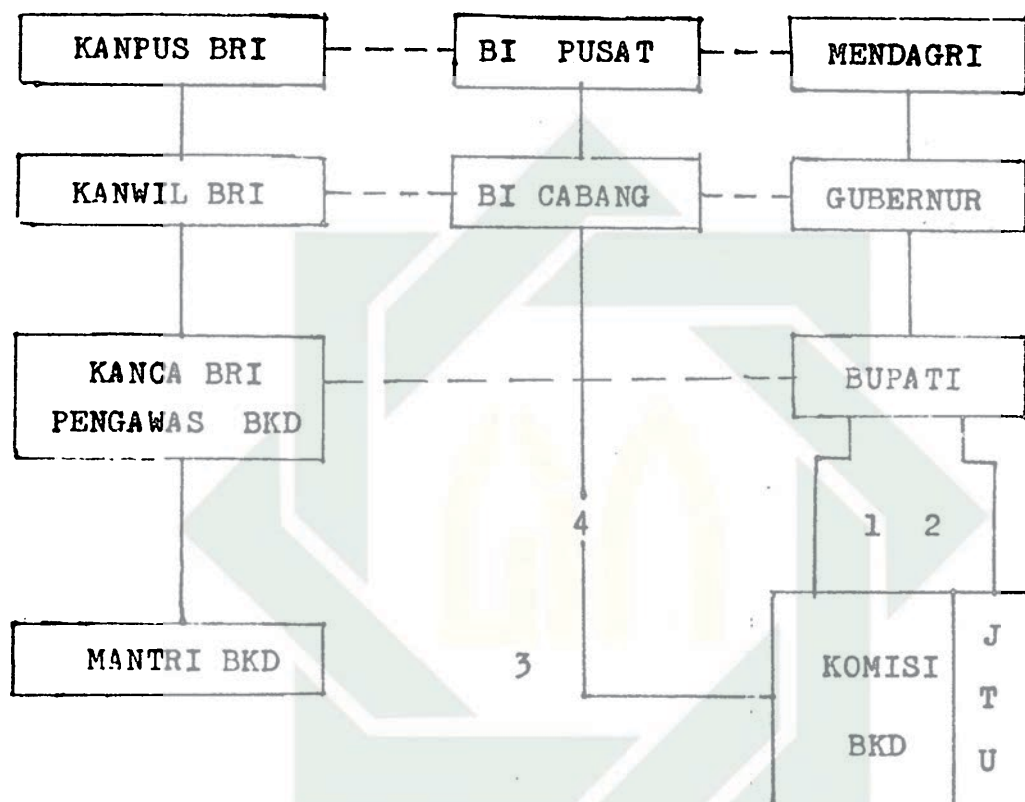
Sedang tugas dari seorang JTU BKD idealnya membawahi 6 BKD. Ratio 1 : 6 tersebut dengan pertimbangan bahwa BKD tidak buka tiap hari tetapi satu minggu sekali, sehingga JTU dapat mengatur waktu hari buka masing-masing BKD dalam wilayah kerjanya, di samping untuk meringankan beban Iuran Dana Usaha untuk masing-masing BKD.

Seorang JTU idealnya membawahi 6 BKD, tetapi bagi seorang Mantri BKD idealnya membawahi maksimum 18 BKD dengan asumsi buka mingguan. Dengan ratio 1 : 8 tersebut diharapkan tiap BKD sebulan sekali dikunjungi Mantri BKD di samping Mantri BKD masih ada kesempatan untuk membuat laporan dan mengerjakan administrasi. (Dasar Hukum dan Organisasi BKD, 1992 : 15).

6. Struktur Koordinasi Organisasi BKD

Untuk lebih jelasnya koordinasi dari pelaksanaan BKD yang terdapat di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, maka adanya struktur koordinasi organisasi BKD perlu sekali, sehingga keberadaan BKD dapat terkoordinasi dengan baik dan terarah. Struktur koordinasinya adalah sebagai berikut :

STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI BKD



KETERANGAN :

1. PEMBINAAN SECARA HIERARCHIS
2. PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN GAJI JTU
3. PENGAWASAN
4. PEMBINAAN BANK

----- GARIS KOMANDO
----- GARIS KOORDINASI (Dasar Hukum dan

Organisasi BKD, 1992 :).

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa,

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa,

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa,

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa,

- Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa,

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa,

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa,

3. Jenis Pinjaman Pada BKD

a. Mingguan

- b. Selapanan**

dak boleh diwakilkan.

III. Peminjam Baru

Peminjam baru harus ada oengantar dari Pamong Blok yang disetujui oleh Kepala Desa dab benar benar punya usaha.

Demikian tata tertib di atas, diharap para peminjam mengerti dan mentaatinya demi kelancaran BKD ini, terima kasih.

Koordinator BKD

ttā

(Sumber Data : Kantor BKD).

(Sutrisno)

D. Praktek Pelaksanaan Kredit Pada BKD

1. Kegiatan Operasional BKD

Wilayah kerja BKD hanya meliputi satu wilayah desa dengan usaha sebagai berikut :

a. Memberikan pinjaman untuk dagang, tani, kera-

- Kebijaksanaan pemberian pinjaman seperti menentukan bunga, besarnya maksimum pinjaman ditentukan dalam musyawarah desa/rembug desa dengan mempertimbangkan petunjuk dari BRI selaku pembina teknis perbankan. (Wawancara. Mantri BKD : Sukiran).

Yang dimaksud dengan menawarkan kredit BKD adalah bagaimana agar masyarakat tahu dan selanjutnya mau meminjam kredit di BKD yang ada di Desa Janti ini. Adapun cara menawarkan yang dilakukan oleh BKD adalah tidak lain lewat rembug desa atau lewat para anggota BKD itu sendiri, dengan memberitahu masa pinjamannya, bunga yang harus dibayar, prosedurnya ringan dan tanpa adanya jaminan. Jika ada yang berminat, maka bisa berhubungan

b. Calon nasabah telah mempunyai usaha sedan ber
jalan (mempunyai penghasilan tetap).

Setelah mendapat persetujuan dari Pamong Desa dan mendaftarkan diri pada kantor BKD, maka calon nasabah siap untuk melakukan cap jempol sebagai cara termudah untuk menghindari pemalsuan. Selanjutnya petugas BKD menyerahkan sejumlah uang kredit yang sesuai dengan permintaannya yang sudah disetujui oleh komisi BKD, sekaligus dipotong untuk uang tabungan nasabah sebesar 5%.

(Wawancara : Nasabah, Pemong Desa dan Komisi BKD).

5. Cara Angsuran dan Yang Bertanggung Jawab Bila Nasabah Meninggal.

Sebelum nasabah mengambil kredit dari BKD, maka Komisi BKD menerangkan lebih dahulu mengenai bentuk-bentuk pinjaman di BKD ini diantaranya : Bentuk Mingguan, Selapangan dan Musiman. Adapun keterangan itu bagi para nasabah ada pilihan dan bisa mengukur kemampuan dirinya untuk melunasi hutang-hutangnya di BKD.

Bilaman nasabah memilih bentuk mingguan, maka dalam melunasi kreditnya dengan cara tiap-tiap minggu sekali, jika memilih selapanan, maka mengangsurnya pada

tiap-tiap lahan dan mengambilnya dengan bentuk musiman maka mengangsurnyapun pada tiap-tiap musim panen. (Wawancara, Komisi I : Suropto).

Selanjutnya bila terjadi suatu musibah pada nasabah misalnya : Meninggal dunia, sedang nasabah tersebut belum melunasi kreditnya pada BKD. Dalam hal ini ada kebijaksanaan tersendiri dari BKD yaitu : nasabah tersebut didaftarkan pada asuransi jiwa. Asuransi itu bernama Beringin Sejahtera dan preminya yang menanggung adalah BKD bukan nasabah. (Wawancara, Menteri BKD : Sukiran).